

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2018, PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari sisi pelaksanaan kegiatan terdapat 3 unit pelaksana kegiatan yaitu :

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP).
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP);

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2018 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 2.598.851.228,- dari pagu Rp 2.641.630.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 98,38% berpredikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu *Pelaksanaan Administrasi Perkantoran* dengan 11 (sebelas) sub kegiatan yakni :
 - a) Honorarium pengelolaan keuangan;
 - b) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - d) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - f) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g) Penyediaan alat tulis;
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan

k) Pengamaan aset, kantor dan rumah jabatan.

Ditahun 2018 untuk kegiatan yang bersifat rutin semua pendanaannya dimasukan dalam 1(satu) dokumen pelaksanaan anggaran dan dikelola di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV terlaksana sebesar Rp 578.488.406,- dari pagu Rp. 581.650.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,79% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan dalam program ini adalah *Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana*.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.077.734.022,- dari pagu dana Rp. 1.092.755.800,- atau dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,63% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian fisik sebesar 100% predikat kinerja **Sangat tinggi (ST)**.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 345.155.050,- dari pagu dana Rp. 348.150.000,- atau rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,13% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :
 - a) Kegiatan *Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran* sampai dengan triwulan IV terlaksana sebesar Rp. 175.408.250,- dari pagu dana Rp. 175.740.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,81% dan capaian kinerja fisik (K) 100%.
 - b) Kegiatan *Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan* terlaksana sebesar Rp. 169.746.800,- dari pagu dana Rp. 172.410.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,46%, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100%.
5. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan terealisasi sebesar Rp. 253.425.126,- dari pagu dana Rp. 258.200.500,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 98.15% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Pembinaan Pasca Panen* berupa

pelatihan pasca panen komoditi karet pada 4 kelompok tani.

a. Permasalahan:

Pengolahan karet di kelompok tani sebagian besar hasilnya belum memenuhi standar bokar bersih, sehingga penjualan lump relatif masih rendah

b. Solusi:

Perlu diberikan fasilitasi berupa bantuan peralatan pasca panen untuk memperbaiki mutu hasil olahan karet pada kelompok tani lainnya.

c. Rencana Tindak Lanjut:

Pembentukan kelembagaan petani berupa UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar), yang merupakan kelembagaan di tingkat petani yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pasca panen karet

6. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan realisasi keuangan sebesar Rp. 222.825.100,- dari pagu dana Rp.277.598.500,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 80,27% predikat kinerja **Tinggi (T)**., untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 52,38% dengan predikat kinerja **Rendah (R)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Pengolahan Hasil Perkebunan* dengan capaian fisik jumlah produk olahan hasil perkebunan sebanyak 11 (sebelas) Produk yaitu, lada bubuk, lada biji, jahe lada instan, kopi jahe lada, sirup air kelapa, selai daging kelapa, VCO. Gula semut aren, gula cetak aren, es kopyor dan saos lada.

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan realisasi keuangannya pada triwulan IV sebesar Rp. 41.317.650,- dari pagu dana Rp. 41.800.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,85% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 68% dengan predikat kinerja **Sedang (S)**. Pada program ini, target kegiatan 25 transaksi dan realisasi 17 transaksi.

a. Permasalahan:

Untuk mencapai target kegiatan 25 transaksi diperlukan prasarana dan sarana promosi yaitu dengan mengikuti pameran dan expo di dalam maupun luar daerah, namun permasalahannya adalah pagu anggaran yang sangat terbatas.

b. Solusi:

Penambahan pagu anggaran

c. Rencana Tindak Lanjut:

- Mengikuti pameran dan expo bersama-sama/berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti mitra kerja pembangunan di bidang perkebunan antara lain, perusahaan besar swasta/GAPKI, asosiasi petani, produsen benih, produsen obat-obatan dan petani andalan.
8. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit realisasi keuangan pada triwulan IV sebesar Rp. 922.495.300,- dari pagu dana Rp. 9406.750.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 97,44% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) mencapai 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan*, ditahun 2018 target perluasan sebesar 25 Ha untuk komoditi lada.
 9. Program Konservasi Lahan dan Air dengan pagu dana sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 296.772.900,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,92% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) yakni 142 % dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah *Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan* dengan target identifikasi embung 50 unit, untuk realisasi sampai dengan triwulan IV identifikasi embung sebanyak 71 unit.
 10. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 143.486.900,- dari pagu sebesar Rp. 147.000.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 97,61% predikat kinerja **Sangat Tinggi (S)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (S)**. Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah kegiatan *Pengembangan Database Usaha Perkebunan* dengan target 2 database. 2 database ini berupa peta sebaran IUP Kaltim dan laporan sebaran perijinan. Database ini diperoleh pada akhir tahun, saat ini masih dalam proses pengumpulan data.
 11. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 151.825.500,- dari pagu sebesar Rp. 153.000.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,23% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 50% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah *Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan*. Sampai Triwulan IV jumlah kemitraan usaha perkebunan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 10 kelompok dari target 20 kelompok.

a. Permasalahan:

Target belum tercapai dikarenakan baru 10 perusahaan yang mengajukan penilaian usaha perkebunan

b. Solusi:

Melakukan koordinasi dengan perusahaan

c. Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan sosialisasi dan berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan

12. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp. 571.587.693,- dari pagu sebesar Rp. 602.500.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 94,87% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 118,67% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Sertifikasi Benih* dengan target 150 (seratus lima puluh) lembar. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 178 lembar.
13. Program Pengendalian OPT realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp. 55.892.840,- dari pagu sebesar Rp. 56.400.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,1% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Target 25 kelompok tani sudah tercapai.
14. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp. 323.977.700,- dari pagu sebesar Rp. 397.840.200,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,74% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)* dengan target 2.500 Kg. Masih dalam pembuatan starter, diperkirakan dalam waktu 3 minggu target sebanyak 2.500 kg akan tercapai.
15. Program Penyediaan Bahan Tanaman realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp. 1.298.114.766,- dari pagu sebesar Rp. 1.314.725.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,74% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan* dengan target 115.000 benih. Program ini tidak sesuai target dikarenakan ketika pelaksanaan tender mengalami 3 kali gagal, tetapi

sekarang sudah ditetapkan penyediannya dengan masa kerja 3 Mei – 8 November 2018. Target 115.000 benih telah tercapai di triwulan IV.

16. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan realisasi keuangan triwulan III sebesar Rp. 184.531.000,- dari pagu sebesar Rp. 204.300.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 90,32% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Intensifikasi Lada* dengan target 75 ha. Target telah tercapai dan rencana tindak lanjutnya dengan melakukan monitoring.

Tahun 2018 Dinas Perkebunan melaksanakan 16 (enam belas) program pembangunan perkebunan dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 9.364.300.000,-** (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 9.066.881.181,-** (sembilan milyar enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau **95,69%** realisasi fisik dan **95,68%** realisasi keuangan.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan khususnya untuk mencapai sasaran startegis dalam penetapan kinerja, hasil yang diperoleh belum maksimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya adalah :

- a) ketersediaan benih
- b) serangan hama dan penyakit.
- c) stabilitas harga, serta
- d) aspek pemasaran.

Diharapkan pada tahun 2019 nanti masalah-masalah tersebut diatas dapat diminimalisir dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih diarahkan untuk mencapai sasaran yang ingin diperoleh, adapun kegiatan tersebut antara lain perbanyak bahan tanaman perkebunan, yang bertujuan menyiapkan benih komoditi unggulan perkebunan melalui pembangunan kebun-kebun induk dan sumber benih untuk menjamin ketersediaan benih dilapangan, untuk mengatasi serangan hama dan penyakit akan dilakukan identifikasi dan pengendalian OPT serta pengembangan dan perbanyak agens pengendali hayati (APH) yang merupakan pengendalian

dengan metode ramah lingkungan sedangkan disektor pemasaran masih lemah di jalur kelembagaannya, hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya pasar komoditas perkebunan salah satunya dimana pasar ekspor komoditas perkebunan masih terkonsentrasi pada negara pengimpor tradisional sedangkan untuk pasar baru masih terbatas. Di samping itu, pembentukan harga juga dikuasai oleh beberapa pelaku pasar, permasalahan pun terjadi dalam hal keterjangkauan harga dimana struktur pasar produk pertanian dikuasai oleh beberapa pelaku utama saja. Oleh sebab itu, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel II.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton/Tahun)	Meningkatnya produksi 5 komoditi unggulan perkebunan provinsi Kalimantan Timur								
	a. Kelapa sawit		12.400.000	14.600.000	18.000.000	18.000.000	11.418.110	13.164.310	18.000.000	18.000.000
	b. Karet		60.318	62.910	93.250	93.250	62.106	63.510	93.250	93.250
	c. Kakao		9.028	4.148	3.850	3.850	2.751	2.435	3.850	3.850
	d. Kelapa Dalam		8.301	9.137	10.930	10.930	11.078	13.647	10.930	10.930
	e. Lada		7.464	8.364	7.420	7.420	4.727	6.057	7.420	7.420
2.	Tingkat Produktivitas Komoditi Perkebunan (Ton/Ha/Th)	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB								
	a. Kelapa Sawit		17,00	18,00	19,00	19,00	14,95	16,69	19,00	19,00
	b. Karet		1,27	1,30	1,30	1,30	1,29	1,27	1,30	1,30
	c. Kakao		0,73	0,77	0,77	0,77	0,55	0,50	0,77	0,77
	d. Kelapa Dalam		0,54	0,68	0,68	0,68	0,63	0,80	0,68	0,68
	e. Lada		1,33	1,10	1,00	1,00	0,72	0,98	1,10	1,10
3.	Penambahan Luas Kebun (Hektar)	Persentase luas kebun								
	a. Kelapa Sawit		1.600.000	1.230.000	1.300.000	1.300.000	1.150.078	1.192.342	1.300.000	1.300.000
	b. Karet		106.000	123.740	128.740	128.740	116.869	115.160	128.740	128.740

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c. Kakao		11.500	9.496	9.000	9.000	7.931	7.778	9.000	9.000
	d. Kelapa Dalam		21.500	0	0	0	22.897	22.289	0	0
	e. Lada		10.500	11.061	11.781	11.781	9.382	9.012	11.781	11.781
4.	Jumlah Kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK/ tahun	Meningkatnya jumlah kegiatan yang menerapkan penurunan emisi GRK	5	-	-	-	5	-	-	-
5.	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	Meningkatnya mitigasi emisi gas rumah kaca & penerapan ISPO	-	25%	25%	25%	-	30,70%	25%	
	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)		-	-	-	-	-	-	-	4,79
6.	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	Terlindungnya sumber-sumber air dan lahan yang bernilai konservasi tinggi		50%	50%	50%	-	73,37 %	50%	50%
7.	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah		-	-	-	-	-	-	5.1
8.	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan								17.544
9.	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Perusahaan)	Terselenggara nya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dan tertib hukum		-	-	-	-	-	-	43
10.	NTP pekebun (%)	Meningkatkan kesejahteraan pekebun		-	-	-	-	-	-	89

Uraian Pencapaian Kinerja

1. Perluasan Tanaman Kelapa Sawit

Seiring dengan penganan program satu juta hektar kelapa sawit di Kalimantan Timur, luas kelapa sawit mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2013 luas tanaman kelapa sawit sebanyak 944.826 hektar dan pada tahun 2017 luas tanaman menjadi 1.192.342 hektar, sehingga terjadi kenaikan sebanyak 247.516 hektar atau 26,19 persen. Peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) meningkat tajam ditahun 2017 menjadi 13.164.310 ton tandan buah segar (TBS) dari 6.901.602 ton (2013), sehingga peningkatannya sebesar 6.262.708 ton TBS atau 90,74 persen.

2. Perluasan Tanaman Karet

Komoditi karet turut mengalami kenaikan luasan secara signifikan siring terlaksananya program revitalisasi karet di wilayah Kabupaten dan Kota. Luas tanaman karet mengalami kenaikan sebanyak 14.004 hektar atau 13,84 persen, dimana pada tahun 2013 luas tanaman karet masih 101.156 hektar menjadi 115.160 hektar pada tahun 2017. Produksi karet di tahun 2013 sebesar 59.963 ton karet kering dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 63.510 ton karet kering sehingga mengalami peningkatan sebesar 3.547 ton karet kering atau 5,91 persen.

3. Perluasan Tanaman Kakao

Komoditi kakao mengalami penurunan luas tanam sebanyak 3.221 hektar atau (29,28 persen), dimana pada tahun 2013 luas tanan kakao mencapai 10.999 hektar menjadi 7.778 hektar pada tahun 2017. Penurunan luas tanam akibat tidak seimbangnya antara peremajaan (penanaman baru) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. Selain itu adanya alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan. Hal ini seiring dengan terjadinya penurunan terhadap produksi kakao sebesar 3.758 ton biji kakao kering atau (60,68 persen), dimana pada tahun 2013 produksi sebesar 6.193 ton dan pada tahun 2017 menjadi 2.435 ton.

4. Perluasan Tanaman Kelapa Dalam

Komoditi kelapa dalam di Kalimantan Timur juga mengalami penurunan luas tanam sebanyak 4.963 hektar (18,27 persen) dari 27.272 hektar pada tahun 2013 menjadi 22.289 hektar pada tahun 2017. Penurunan luas tanam akibat tidak seimbangnya antara peremajaan

(penanaman baru) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. Penurunan luasan kelapa dalam diikuti dengan turunnya jumlah produksi yang mana pada tahun 2013 produksi kelapa dalam sebesar 13.266 ton dan tahun 2017 menjadi 13.647 ton sehingga jumlah kenaikan sebesar 381 ton atau 2,87 persen.

5. Perluasan Tanaman Lada

Komoditi lada mengalami penurunan luas tanam yang cukup drastis akibat banyaknya tanaman tua dan mati, alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan. Pada tahun 2013 luas tanam sebanyak 9.316 hektar menjadi 9.012 hektar pada tahun 2017, sehingga mengalami penurunan sebanyak 304 hektar atau (3,26 persen). Produksi lada mengalami penurunan akibat berkurangnya luas tanam produktif dan minimnya pemeliharaan tanaman. Pada tahun 2013 produksi sebesar 6.784 ton lada kering dan tahun 2017 produksi lada menjadi 6.057 ton lada kering sehingga terjadi penurunan produksi sebesar 727 ton lada kering atau (10,71 persen).

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa peluang dan ancaman juga kekuatan dan kelemahan yang ada terkait dengan dinamika lingkungan strategis, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2018, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 394 ijin seluas 3.089.234 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.594.626 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2017 adalah 1.192.342 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 1,2 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

Tabel II.3
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2017

No.	Kabupaten/ Kota	PEMANFAATAN LAHAN			Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
		Luas yang Telah Dibeberani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	
1	2	3	4	5	6
1	Berau	314,581	207,314	123,604	92,650
2	Kutai Timur	791,203	749,947	357,568	352,882
3	Kutai Kertanegara	679,578	668,980	266,478	189,657
4	Kutai Barat	549,974	419,488	163,331	121,226
5	Mahakam Ulu	269,723	178,076	35,047	19,862
6	Penajam Paser Utara	136,031	136,726	31,589	30,406

No.	Kabupaten/ Kota	PEMANFAATAN LAHAN			Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
		Luas yang Telah Dibebani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	
1	2	3	4	5	6
7	Paser	348,144	234,094	134,899	86,714
8	Samarinda	-	-	-	-
9	Balikpapan	-	-	-	-
10	Bontang	-	-	-	20
	Jumlah	3,089,234	2,594,626	1,112,515	893,417

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2018)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak clear dan cleannya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek landbanking yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Lambatnya Realisasi Pembangunan Perkebunan** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- Tidak clear dan clean nya perijinan di sektor perkebunan;
- Pengawasan dan penegakan hukum terdapat pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU;
- Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan tidak dicabut;
- Adanya ijin perkebunan pada lokasi lokasi yang tidak sesuai;
- Upaya pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun kelapa sawit masa pembangunan dan operasional tidak semuanya dilakukan penilaian;
- Konflik lahan akibat terjadi tumpang tindih masalah perizinan usaha perkebunan;

- g. Kebijakan pembangunan perkebunan dalam hal pemberian ijin antara Provinsi dan Kab belum selaras; dan
- h. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi dan pengawasan yang modern berbasis IT dan spasial.

2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,46% (4,49% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2013-2017 pada tabel berikut:

Tabel II. 4
Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2017

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)					Potensi berdasarkan PDKP
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kelapa Sawit	15.23	14.76	15.39	14.47	15.72	20.00
Karet	1.38	1.38	1.38	1.33	1.34	1.67
Kakao	0.904	0.707	0.765	0.552	0.501	1.00
Kelapa Dalam	0.654	0.564	0.684	0.634	0.802	1.50
Lada	1.046	1.034	1.061	0.724	0.985	1.20
Kopi	0.286	0.229	0.215	0.243	0.256	1.30

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk di tingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Permasalahan “**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan permodalan;
- b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;
- c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;
- d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS ;
- e. Ketersediaan bibit yang berkualitas kurang;
- f. Penggunaan bibit yang illegitim;
- g. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan
- h. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit terhambat

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 162.899 Ha pada tahun 2016 dan 159.725 Ha pada tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, areal komoditi non sawit mengalami penurunan hingga mencapai 1,95%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan **“Pengembangan komoditas perkebunan non sawit terhambat”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya harga komoditas non sawit;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya; dan
- d. Minat pasar terhadap komoditas non sawit masih rendah.

4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan

harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kaltim, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern;
- b. Kurangnya pelatihan dan praktker mengolah mandiri oleh para pekebun;
- c. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah masih menggunakan alat dan mesin manual/sederhana;
- d. Kurangnya Sosialisasi, Promosi dan pengenalannya komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/Kota;
- e. Terbatasnya akses Informasi tentang pasar/harga produk komoditi perkebunan;
- f. Keterbatasan infrastruktur dasar untuk menarik investasi;
- g. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- h. Tataniaga produk perkebunan yang sangat rumit/panjang; dan
- i. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani.

5. Kampanye negatif dan tuntutan isu lingkungan di sektor perkebunan

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional dan nasioan dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan **“Kampanye negatif dan tuntutan isu lingkungan di sektor perkebunan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Perang dagang antar negara;
- b. Tidak dipahami usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam upaya membangun kebun yang berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang untuk pembangunan kebun sawit;
- d. Pembangunan kebun rakyat yang berada di kawasan hutan;
- e. Supply Chain produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- f. Praktek landbanking;
- g. Pengawasan dan penerapan Sanksi belum dilakukan oleh penerbit izin usaha;
- h. Belum selarasnya kebijakan pembangunan Perkebunan di tingkat Provinsi dan Praktek perijinan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten;
- i. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam; dan
- j. Pemanfaatan biomassa untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal.

6. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pembangunan Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisi data tabular variabel kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu : Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.

Akar permasalahan **“Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah”** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;
- c. Sistem pelaporan belum ada referensi secara spasial;
- d. Kurangnya dukungan SDM dalam pengelolaan data;
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik; dan
- f. Infrastruktur pengelolaan data di Kabupaten/Kota masih terbatas.

7. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan pekebun

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya

perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan pekebun”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;
- b. Bentuk organisasi yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;
- c. Cepatnya mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota;
- d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;
- e. Rantai pemasaran komoditas Perkebunan masih Panjang dan tidak efisien;
- f. Pengembangan iptek yang dibutuhkan oleh dunia usaha belum optimal; dan
- g. Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana dan prasarana.

II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*) terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Kekuatan yang dimiliki :

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat.
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai.
- Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Disbun cukup memadai.
- Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan
- Hasil pembangunan bidang perkebunan selama ini
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang perkebunan.

2. Peluang yang dimiliki :

- Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang perkebunan.
- Potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif.
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif.
- Adanya pengaruh globalisasi.
- Ketergantungan hasil perkebunan masyarakat cukup tinggi.

3. Kelemahan yang dimiliki :

- Belum lengkap dan akuratnya *data-based* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kaltim.
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal.
- Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan.
- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai.
- Lemahnya penegakan hukum.
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik.
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat

- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masih rendah

4. Ancaman yang dimiliki :

- Implementasi Tata Ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan.
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan.
- Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang.
- Moratorium ijin pengembangan perkebunan.
- Isu emisi gas rumah kaca.
- Perubahan cuaca/iklim imbas dari global warming.
- Aksesibilitas kawasan perkebunan masih terbatas.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan.
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal.
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal.
4. Optimalisasi sistem informasi database dalam mendukung pembangunan perkebunan.
5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah.
6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kebun.
7. Koordinasi internal maupun eksternal secara intensif.
8. Tingkatkan konsolidasi internal.
9. Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat serta konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang perkebunan sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan.

10. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Disbun cukup memadai dan potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif membuat kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal.

II. 5. Review Terhadap Rancangan RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Peningkatan produksi perkebunan; Program Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan; dan Program Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD.

II. 6. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah kedepan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perkebunan;
2. Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan;
3. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan; dan
4. Peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan.

Berdasarkan hasil forum OPD Lingkup Dinas Perkebunan se Kalimantan Timur, berikut beberapa program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi.

Tabel. II. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Kabupaten	Program/Kegiatan	Sasaran/Kegiatan	Target Kegiatan	Lokasi	Usulan Dana	Komitmen	Keterangan	Catatan
3.03.88		Program Penyediaan Bahan Tanaman							
3.03.88.01	Berau	Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan	Pemenuhan bibit lada	20000 pohon	Pesayan, Kec. Sambaliung	120,000,000	-	Pengembangan tanaman lada (membangun kebun induk) lokasi: pesayan	Sesuai dengan program prioritas provinsi
3.03.58		Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan							
3.03.58.01	Kutai Timur	Intensifikasi Komoditi	Kelompok Tani	79 Ha	Bumi Jaya Kec. Kaubun Bumi Rapak Kec. Kaubun Cipta Graha Kec. Kaubun	87,000,000	-		- Sesuai prioritas provinsi - Lokasi diusulkan di kec. Karang, desa Karang, dan Batu Ekoq
3.03.58.03	Kutai Barat	Peremajaan Komoditi Perkebunan	Terlaksananya rehab kebun karet rakyat	200 Ha	Asa, Kec. Barong Tongkok, Dua Asa Kec. Barong Tongkok; Sekolaq Darat, Kec. Barong Tongkok; Purwodadi Kec. Linggang Bigung; Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat	100,000,000	100,000,000		- Komoditi kakao 100 Ha Sesuai Prioritas provinsi 100 Ha
3.03.76		Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca							
3.03.76.04	Kutai Timur	Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	Kelompok Tani Kakao	4 Kelompok Tani	Bukit Harapan Kec. Kaliorang, Belangkau kec. Kaliorang; Karangan Iir Kec. karangan, Danau redan Kec. teluk pandan	50,000,000	-		Kelompok tani kakao diganti menjadi kelompok tani sawit